

PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DENGAN VARIABEL BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAHAN PROVINSI TAHUN 2015-2019

*The Effect of Regional Financial Ratios on Gross Regional Domestic Bruto
with Variable of Capital Expenditure as Moderation Variable in the
Provincial Government 2015-2019*

Slamet Widodo

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: slamet.widodo@dpr.go.id

Abstract

Regional governments role becomes dominant in determining the implementation of regional development in increasing economic growth. Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) is illustrated by several ratios that measure regional finances, namely the degree of decentralization (X1), regional financial dependence (X2), the degree of Regional Owned-Enterprises contribution (X3), the effectiveness of Local Origin Revenues (X4), and the allocation of regional capital expenditures (X5). This study discusses the effect of these financial ratios on GRDP with the capital expenditure variable as a moderating variable in the Provincial Government in the 2015-2019 period. The data used is the accumulated Provincial Regional State Budget and GRDP data for the period 2015-2019. The methodology used is the fixed effect panel data regression model and regression analysis with moderated regression analysis (MRA). The purpose of this study is to formulate regional financial management policies that are more effective in increasing regional economic growth. Result shows that the model is Fixed Effect and variables X1, X2, and X4 significantly affected GRDP, while variables X5 and X4 otherwise. The results of the MRA analysis show that the moderating variable of capital expenditure has a significant influence on the relationship between the regional financial dependence variable and the GRDP.

Keywords: *Capital Expenditures, Moderated Regression Analysis, Regional Financial Ratios, Fixed Effect Models*

1. Pendahuluan

Selama hampir lebih dari dua dasawarsa Indonesia menjalankan otonomi daerah yang ditandai dengan penyerahan sebagian kewenangan pemerintah

pusat ke pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, pendanaan atas penyerahan sebagian kewenangan juga diikuti dengan desentralisasi fiskal demi memperlancar pelaksanaan kewenangan tersebut. Desentralisasi fiskal diharapkan menjadi perangkat pembiayaan yang efektif untuk mempersempit kesenjangan antardaerah, baik secara horizontal maupun secara vertikal, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Efektivitas pelaksanaan desentralisasi fiskal seringkali dikaitkan dengan beberapa indikator, antara lain derajat desentralisasi dan tingkat ketergantungan keuangan daerah dengan tujuan untuk memetakan kemampuan keuangan daerah sekaligus pola pendekatan kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah pusat. Dengan tingkat ketergantungan keuangan daerah yang rendah, diperlukan pendekatan kebijakan yang bersifat instruktif dengan berlandaskan pada prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Publikasi BPS mengenai tingkat kemandirian provinsi tahun 2015-2020 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kemandirian masih rendah (rasio PAD terhadap pendapatan daerah) yang ditunjukkan dengan 75 persen provinsi berada dalam kategori rendah dan rendah sekali. Hal ini mengisyaratkan bahwa daerah belum mampu sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah.

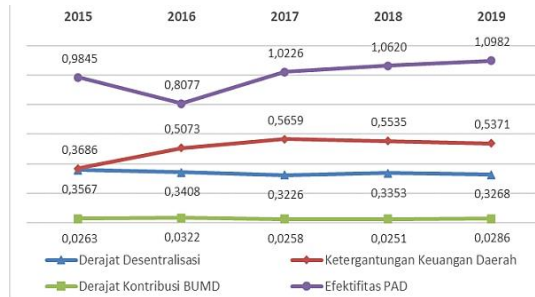
Tabel 1. Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Tingkat Kemandirian 2015-2020

Kategori Kemandirian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rendah Sekali (0-25%)	7	7	10	10	8	8
Rendah (>25-50%)	15	19	16	16	18	19
Sedang (>50-75%)	10	7	8	8	8	7
Tinggi (>75%)	1	0	0	0	0	0
Jumlah	33	33	34	34	34	34

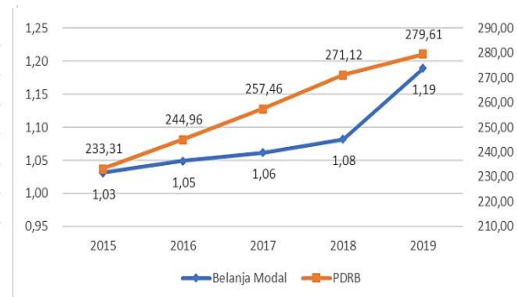
Sumber: BPS (diolah)

Hal ini juga sejalan dengan rasio derajat desentralisasi keuangan pemerintah provinsi tahun 2015-2019 yang rata-rata sebesar 33,6 persen atau masuk dalam kategori “cukup”. Data dalam periode yang sama juga menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer (rasio dana perimbangan terhadap pendapatan daerah) dari pemerintah pusat masih “tinggi”, yaitu rata-rata mencapai 50,6 persen. Perkembangan rata-rata belanja modal dan PDRB pemerintah provinsi dalam tahun 2015-2019 menunjukkan kenaikan masing-masing sebesar 15 persen dan 20 persen.

Gambar 1. Perkembangan Rata-Rata Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2015-2019



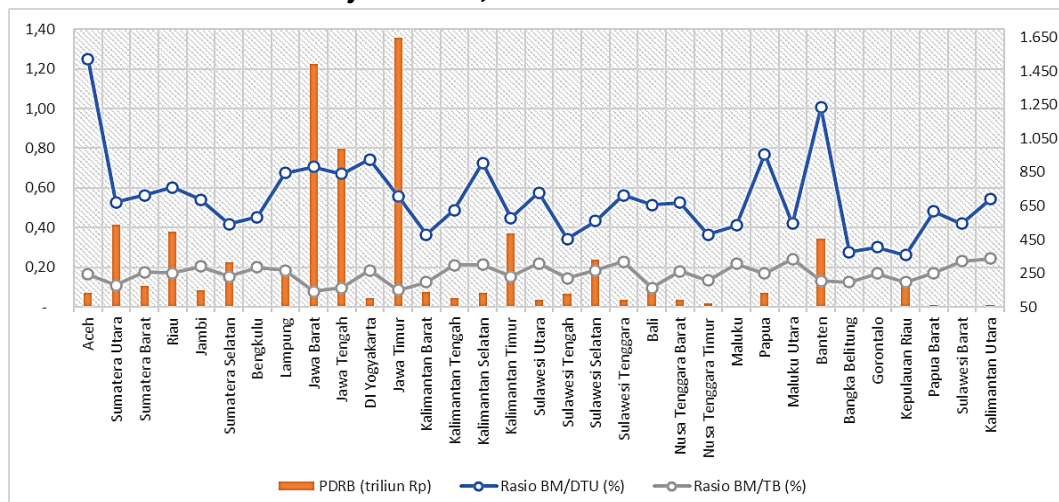
Gambar 2. Perkembangan Rata-Rata Belanja Modal dan PDRB Pemerintah Provinsi Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)



Sumber: BPS (diolah)

Mulai tahun 2018, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2018, pemerintah pusat telah mengeluarkan *mandatory* mengenai kewajiban mengalokasikan minimum 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang diperoleh daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan belanja infrastruktur yang bersumber dari DTU paling lambat tanggal 31 Januari, yang menjadi syarat penyaluran DTU bulan Maret atau DBH Triwulan I. Pemerintah bahkan telah menyiapkan sanksi berupa penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) bila daerah lalai dalam menyampaikan laporan bulanan belanja infrastruktur ini. Pada tahun 2018, pemerintah telah menunda pencairan DAU di 154 daerah karena belum menyampaikan laporan bulanan.

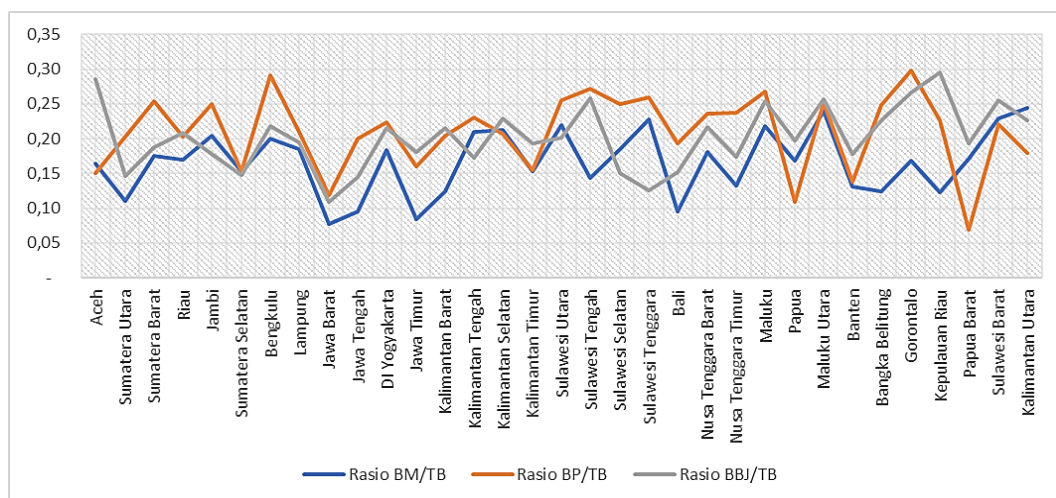
Gambar 3. Rata-rata Rasio Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum, Total Belanja Daerah, dan PDRB Tahun 2015-2020



Sumber: BPS (diolah)

Rasio belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA ditambah dengan Dana Alokasi Umum) pemerintahan provinsi secara rata-rata telah mencapai 54 persen, jauh melampaui ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Namun demikian, rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerah masih sebesar 17 persen (Gambar 3). Angka ini jelas tidak proporsional jika dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja pegawai yang mencapai sebesar 38,5 persen di tahun 2017 dan sebesar 26,8 persen di tahun 2018 atau sebesar rata-rata 21 persen dalam periode tahun 2015-2020 (Gambar 4). Adapun belanja barang dan jasa secara rata-rata mencapai 20 persen.

Gambar 4. Rasio Belanja Modal (BM), Belanja Pegawai (BP), dan Belanja Barang dan Jasa (BBJ) terhadap Total Belanja Daerah (TB) Tahun 2015-2020



Sumber: BPS (diolah)

Melihat data rata-rata kenaikan belanja modal dan PDRB pemerintah provinsi dalam periode tahun 2015-2019, proporsinya yang relatif rendah terhadap total belanja daerah dan kecenderungan tidak adanya perubahan signifikan pada rasio keuangan pemerintah provinsi. Penelitian ini kemudian ingin mengetahui lebih lanjut:

- 1) apakah kinerja keuangan yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, efektivitas PAD, dan alokasi belanja modal memengaruhi PDRB di 33 pemerintah provinsi di Indonesia;
- 2) bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, efektivitas PAD terhadap PDRB melalui alokasi belanja modal sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati hubungan antara variabel bebas yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, efektivitas PAD, dan belanja modal daerah terhadap variabel terikat yaitu PDRB dan hubungan antara variabel bebas yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, efektivitas PAD terhadap variabel terikat yaitu PDRB melalui belanja modal daerah sebagai variabel moderasi.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori/Definisi

Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 membawa konsekuensi perubahan hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang sebelumnya cenderung sentralistik menjadi desentralistik. Asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dibagi menjadi tiga, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Proses desentralisasi sebagai dampak dari penerapan otonomi daerah terbagi menjadi desentralisasi fiskal, desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi ekonomi. Desentralisasi politik tercermin dengan adanya proses pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Desentralisasi administrasi berupa penyerahan sebagian kewenangan/urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan masyarakat, dan desentralisasi ekonomi dimaknai dengan penyerahan tanggung jawab kepada daerah untuk mengelola perekonomian daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Desentralisasi fiskal menjadi konsekuensi pengalihan dana transfer ke daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang menjadi urusan daerah.

Peranan pemerintah daerah menjadi lebih dominan seiring dengan meningkatnya kewenangan daerah dan pendanaannya. Sebagai implikasinya, daerah juga dituntut untuk dapat secara mandiri melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan daerah dalam pembangunan. Meningkatnya jumlah transfer ke daerah dari tahun ke tahun dari siklus perekonomian dapat menggambarkan adanya pergeseran pusat-pusat pertumbuhan dari yang selama ini lokusnya berada di pusat menjadi ke daerah. Peningkatan perekonomian daerah tentunya akan berdampak pada semakin membaiknya tingkat kemandirian daerah, tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, dan meningkatnya pendapatan daerah. Rasio keuangan lainnya yang menjadi indikator bagi daerah (Mahmudi, 2019) adalah sebagai berikut.

1. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Derajat Desentralisasi

Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Desentralisasi Fiskal
0,10 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini merupakan perbandingan dari jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah atas total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,10 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM (1991)

3. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini merupakan perbandingan antara penerimaan bagian laba BUMD dengan penerimaan PAD yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan negara dalam mendukung pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio, maka semakin baik tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam menambah PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Tingkat Efektivitas PAD

Persentase Realisasi PAD terhadap Target PAD	Efektivitas
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (1996)

5. Rasio Belanja Modal

Rasio ini merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Menurut Mahmudi (2010 hal. 164) pada umumnya proporsi belanja modal terhadap belanja daerah adalah antara 5-20 persen. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.2. Hubungan Antarvariabel

a. Hubungan antara Derajat Desentralisasi (DD) terhadap PDRB

PAD memiliki peran penting dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pembiayaan pelayanan publik, selain dari dana perimbangan, juga bersumber dari belanja modal dalam pos belanja langsung APBD. Peningkatan pelayanan publik yang secara langsung berdampak pada peningkatan PAD pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian daerah yang tercermin melalui PDRB. Dengan kata lain, jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan belanja modal, maka pemerintah daerah harus mampu menggali potensi PAD-nya.

b. Hubungan antara Derajat Kontribusi BUMD terhadap PDRB

BUMD berperan dalam memajukan perekonomian daerah dengan memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD. Secara makro, peranan BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi

nilai tambahnya terhadap PDRB dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja.

c. Hubungan antara Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap PDRB

Pendapatan transfer dalam bentuk dana perimbangan merupakan porsi terbesar dalam penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. Dengan asumsi pendapatan transfer dari pemerintah pusat relatif stabil, maka tingkat ketergantungan keuangan daerah sepenuhnya ditentukan oleh besar kecilnya kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan daerah di luar dana perimbangan. Rendahnya tingkat ketergantungan yang ditopang oleh peningkatan pendapatan daerah, di luar dana perimbangan (seperti PAD, kontribusi BUMD, dan penerimaan lainnya yang sah), mencerminkan peningkatan perekonomian daerah yang tercermin melalui PDRB.

d. Hubungan antara Efektivitas PAD terhadap PDRB

Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan daerah dalam memetakan potensi daerah yang sangat berperan dalam peningkatan perekonomian daerah. Rasio efektivitas PAD yang tinggi menjadi salah satu indikator keberhasilan daerah dalam menggali potensi unggulan daerah.

e. Hubungan Belanja Modal terhadap PDRB

Sejak tahun 2018, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimum 25 persen dari Dana Transfer Umum yang diperolehnya dalam bentuk belanja infrastruktur daerah. Peningkatan kondisi infrastruktur daerah sangat berperan dalam menopang kegiatan aktivitas perekonomian daerah sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3. Penelitian Terdahulu

Suci, Asmara (2014) meneliti tentang bagaimana kemandirian keuangan daerah memengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, khususnya di provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan data penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan, serta data PDRB periode tahun 2001–2011. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi dengan metode data panel untuk melihat pengaruh kemandirian keuangan daerah yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa ada pengaruh yang positif antara kemandirian keuangan daerah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Namun demikian, penelitian ini hanya mengamati aspek kemandirian keuangan daerah dan melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan tidak memasukkan indikator keuangan daerah yang lain, seperti rasio ketergantungan, rasio efektivitas PAD, derajat kontribusi BUMD terhadap PDRB.

Penelitian ini juga tidak membahas penggunaan variabel moderasi dalam permodelannya.

Sari *et al.* (tanpa tahun) juga melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan di Provinsi Sulawesi Utara. Kinerja keuangan daerah yang diteliti meliputi rasio kemandirian, rasio ketergantungan, dan rasio efektivitas PAD sebagai variabel bebas dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel terikat. Data penelitian menggunakan metode *sampling* dengan basis data tahun 2004-2014 yang diambil dari beberapa kota di Sulawesi Utara, yaitu kota Manado, Bitung, dan Tomohon. Data ini diolah dengan analisis regresi data panel. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa ada pengaruh positif antara rasio kemandirian daerah dan rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengaruh negatif dihasilkan dari rasio ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, penelitian ini juga tidak menguji variabel belanja modal sebagai variabel moderasi dan hubungan variabel bebas kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat.

Arsa, Setiawina (2015) melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD untuk menguji pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal dan pengaruh langsung belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data APBD dan PDRB menggunakan periode tahun 2006 -2013. Adapun metode penelitian menggunakan analisis jalur (*path analysis*) untuk menguji pengaruh positif dan negatif kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal dan metode analisis data panel untuk melihat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya dua variabel kinerja keuangan daerah yaitu derajat desentralisasi dan efektivitas PAD yang memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan variabel ketergantungan keuangan, variabel kemandirian keuangan dan kontribusi BUMD berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Selanjutnya, hasil regresi data panel menunjukkan bahwa alokasi belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Serupa dengan dua penelitian di atas, penelitian ini juga tidak menguji variabel belanja modal sebagai variabel moderasi hubungan variabel independen kinerja keuangan dengan variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi.

Ayu L. *et al.* (2019) melakukan penelitian menggunakan variabel belanja modal sebagai variabel *intervening* melalui pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Variabel kinerja keuangan yang diuji adalah derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan PAD, efisiensi keuangan, dan efektivitas PAD. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alokasi belanja modal hanya dipengaruhi oleh derajat desentralisasi fiskal efisiensi keuangan. Kesimpulan lainnya adalah hanya variabel pertumbuhan PAD, efektivitas PAD, efisiensi keuangan dan alokasi belanja modal yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel alokasi belanja modal hanya memediasi secara parsial pengaruh variabel derajat

desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, dan efisiensi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tidak membahas belanja modal sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat.

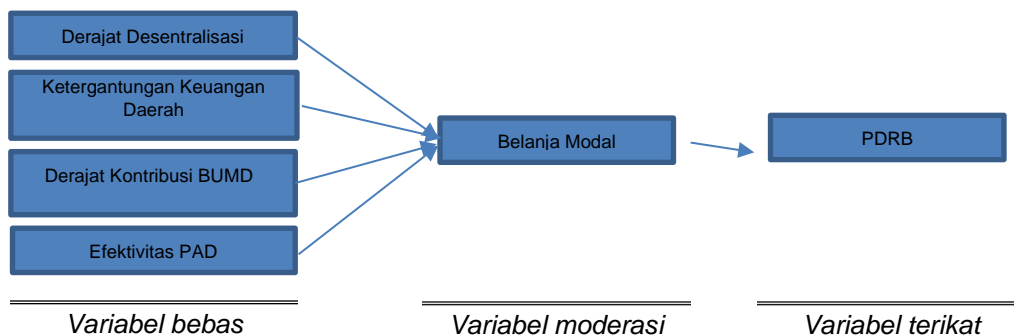
3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah *panel data* berbentuk *time series* dari tahun 2015-2019, dan *data cross section* yang terdiri atas 33 provinsi di Indonesia. Data variabel derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, efektivitas PAD, belanja modal daerah dan PDRB diperoleh dari publikasi BPS dan Kementerian Keuangan.

3.2. Model Penelitian

Berdasarkan pada teknis analisis data di atas, maka model penelitian adalah sebagai berikut:



Persamaan hubungan antara variabel kinerja keuangan pemerintah provinsi terhadap PDRB melalui belanja modal sebagai variabel moderasi dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Persamaan Regresi Linear Berganda Data Panel

$$PDRB = a + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 KKD_{it} + \beta_3 DKB_{it} + \beta_4 EPAD_{it} + \beta_5 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (1)$$

2. Persamaan Regresi Linear *Moderated Regression Analysis* (MRA)

$$PDRB = a + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (2)$$

$$PDRB = a + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 DD * BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (3)$$

$$PDRB = a + \beta_1 KKD_{it} + \beta_2 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (4)$$

$$PDRB = a + \beta_1 KKD_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 KKD * BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (5)$$

$$PDRB = a + \beta_1 DKB_{it} + \beta_2 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (6)$$

$$PDRB = a + \beta_1 DKB_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 DKB * BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (7)$$

$$PDRB = a + \beta_1 EPAD_{it} + \beta_2 BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (8)$$

$$PDRB = a + \beta_1 EPAD_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 EPAD * BM_{it} + \varepsilon_i \dots\dots\dots (9)$$

Keterangan:

PDRB	= Produk Regional Domestik Bruto;
DD	= Derajat Desentralisasi;
KKD	= Ketergantungan Keuangan Daerah;
DKB	= Derajat Kontribusi BUMD;
EPAD	= Efektivitas PAD;
BM	= Belanja Modal Daerah;
$\beta_1 - \beta_3$	= Koefisiensi;
i	= <i>cross section</i> ;
t	= <i>time series</i> ;
ε_i	= <i>error term</i> .

3.3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data panel melalui pemilihan model terbaik melalui uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Tahapan selanjutnya adalah uji *Moderate Regression Analysis* (MRA) dan uji t. Tahapan pengelolaan data dengan variabel moderator adalah uji regresi berganda X1 dan X2 terhadap Y, uji variabel Z apakah *pure moderator*, *quasi moderator*, atau bukan moderator, pengamatan beta positif atau negatif dari interaksi variabel, pembahasan hipotesis, dan interpretasi hasil penelitian.

3.3.1. Teknis Analisis Regresi Berganda dengan Data Panel

Tahapan regresi data panel diawali dengan pemilihan model terbaik melalui pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Melalui serangkaian uji (*Chow-test*, *Hausman-test*, *LM-test*), maka ditentukan model terbaik.

Analisis regresi dengan metode *panel data* adalah metode yang menggunakan penggabungan antara data *cross section* dan *time series*. Data ini dikumpulkan secara *cross section* pada periode waktu tertentu, dan menggunakan tiga metode yaitu *pooled least square*, *fixed effect*, dan *random effect* untuk mengestimasi parameternya. Analisis regresi data panel ini digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh rasio keuangan daerah yang terdiri dari derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, efektivitas PAD, terhadap belanja modal daerah dan PDRB pemerintah provinsi. Adapun estimasi model dituliskan sebagaimana persamaan (1) di atas.

3.3.2. Teknik Analisis Regresi Berganda dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji regresi dengan menggunakan MRA untuk melihat pengaruh belanja modal sebagai variabel moderasi dalam memengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengaruh ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel *moderating* juga dapat menyebabkan sifat atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi positif atau negatif. Menurut Ghozali (2018) Variabel moderasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu *pure moderasi* (moderasi murni), *quasi moderasi* (moderasi semu), *homologiser moderasi*

(moderasi potensial), dan *predictor* moderasi (moderasi sebagai *predictor*). Penentuan jenis variabel moderasi dapat diidentifikasi dengan melihat nilai probabilitas atas persamaan variabel Z terhadap Y dan nilai probabilitas persamaan variabel interaksi ($X*Z$) terhadap Y.

1. Variabel Moderasi Murni (*Pure Moderator*)

Pure moderasi jika nilai probabilitas variabel Z tidak signifikan ($\alpha > 0.05$) dan nilai probabilitas variabel interaksi signifikan ($\alpha < 0.05$), artinya variabel moderasi mampu memengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat tanpa harus menjadi variabel bebas.

2. Variabel Moderasi Semu (*Quasi Moderator*)

Quasi moderasi jika nilai probabilitas variabel Z signifikan ($\alpha < 0.05$) dan nilai probabilitas variabel interaksi signifikan ($\alpha < 0.05$), artinya variabel moderasi mampu memengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sekaligus menjadi variabel bebas.

3. Variabel Moderasi Potensial (*Homologiser Moderator*)

Homologiser moderasi, jika nilai probabilitas variabel Z tidak signifikan ($\alpha > 0.05$) dan nilai probabilitas variabel interaksi juga tidak signifikan ($\alpha > 0.05$), artinya variabel moderasi tidak mampu memengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sekaligus menjadi variabel bebas.

4. Variabel Prediktor Moderasi (*Predictor Moderator Variable*).

Predictor moderasi, jika nilai probabilitas variabel Z signifikan ($\alpha < 0.05$) dan nilai probabilitas variabel interaksi tidak signifikan ($\alpha > 0.05$), artinya variabel moderasi tidak mampu memengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sekaligus menjadi variabel bebas. Variabel ini hanya berperan sebagai variabel bebas dalam model hubungan yang dibentuk.

Hasil identifikasi nilai probabilitas variabel moderasi inilah yang akan menentukan apakah variabel tersebut merupakan variabel moderasi atau bukan. Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan hasil variabel moderasi sebagai *pure* moderasi dan *quasi* moderasi, maka interpretasi penelitian menggunakan model ini. Model regresi MRA sebagaimana persamaan (2) sampai dengan persamaan (9).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui model estimasi awal yang dilanjutkan dengan serangkaian uji yaitu *Chow-Test*, *Hausman Test*, dan *Lagrange Multiplier Test*.

Tabel 5. Hasil Uji Model Terbaik

Uji		Nilai Prob.	Prasyarat
<i>Chow-test</i>	<i>Cross-section F</i>	0.0000	H_0 = Jika <i>Chi Square</i> > 0,05 , maka yang diterima adalah CEM. H_1 = Jika <i>Chi Square</i> < 0,05, maka tolak H_0 dan menerima FEM.
	<i>Cross-section Chi square</i>	0.0000	
<i>Hausman test</i>	<i>Cross-section random</i>	0.0000	H_0 = Jika <i>Chi Square</i> > 0,05, maka terima H_0 yaitu REM lebih tepat. H_1 = Jika <i>Chi Square</i> < 0,05, maka tolak H_0 , yaitu FEM lebih tepat.

Sumber : BPS (diolah)

Berdasarkan hasil kedua uji tersebut, maka model regresi mengikuti *Fixed Effect Model (FEM)*. Dikarenakan *Chow-test* maupun *Hausman-test* menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *Fixed Effect*, maka tidak diperlukan *LM test*.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antarvariabel bebasnya.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolineritas

	DD	KKD	DKB	EPAD	BM
DD	1.000000	-0.443366	0.020666	-0.052050	0.269635
KKD	-0.443366	1.000000	-0.204115	-0.091048	-0.608772
DKB	0.020666	-0.204115	1.000000	0.036755	0.182413
EPAD	-0.052050	-0.091048	0.036755	1.000000	0.169298
BM	0.269635	-0.608772	0.182413	0.169298	1.000000

Sumber : BPS (diolah)

Dari tabel di atas, dapat dilihat nilai koefisien korelasinya antarvariabel bebas dibawah 0,80 yang berarti tidak terjadi multikolineritas.

4.2.2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari *residual* untuk semua pengamatan pada model regresi. Proses melakukan pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser*.

Tabel 7. Tabel Uji Glejser

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.186388	0.313030	0.595432	0.5526
LOG(DD)	-0.006178	0.026353	-0.234429	0.8150
LOG(KKD)	-0.010193	0.009493	-1.073649	0.2850
LOG(DKB+2)	-0.436330	0.439601	-0.992557	0.3228
LOG(EPAD)	0.018877	0.016053	1.175865	0.2418
LOG(BM)	0.022777	0.011567	1.969230	0.0511

Sumber : BPS, (data diolah)

Hasil uji *glejser* menunjukkan bahwa nilai *prob* seluruh variabel $< 0,05$, maka terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastis.

4.3. Uji Regresi Linear Berganda Data Panel

4.3.1. Uji *F-statistic*

Tabel 8. Uji *F-statistic*

<i>F-Statistic</i>	<i>P-value</i>			Kesimpulan
1152.084	0.000000			Signifikan
		Daerah kritis H_0 ditolak jika $p\text{-value} < \alpha = 0,05$		

Sumber: BPS (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai $p\text{-value}$ $0,0000 < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, derajat kontribusi BUMD, efektivitas PAD, dan belanja modal daerah secara bersama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu PDRB.

4.3.2. Uji *T-statistic*

Tabel 9. Uji *T-statistic*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.53917	0.689121	16.74476	0.0000
LOG(DD)	-0.165949	0.058015	-2.860446	0.0049
LOG(KKD)	0.139776	0.020899	6.688100	0.0000
LOG(DKB+2)	-0.163133	0.967761	-0.168567	0.8664
LOG(EPAD)	0.132032	0.035341	3.735940	0.0003
LOG(BM)	0.043097	0.025463	1.692530	0.0930

Sumber: BPS (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *prob.* seluruh variabel lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0,05$, sehingga berpengaruh signifikan terhadap variabel PDRB, kecuali variabel DKB dan BM yang nilainya melebihi 0,05 sehingga dikatakan tidak signifikan memengaruhi PDRB.

4.3.3. Uji Koefisien Determinasi R²

Di dalam penelitian ini, koefisien determinasi R² yang digunakan ialah menggunakan nilai *Adjusted R-squared* pada saat menilai model regresi yang terbaik. Disebabkan dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas.

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi R²

R-squared	0.997030	Mean dependent var	11.81101
Adjusted R-squared	0.996164	S.D. dependent var	1.083499
S.E. of regression	0.067106	Akaike info criterion	-2.366238
Sum squared resid	0.571909	Schwarz criterion	-1.650929
Log likelihood	233.2146	Hannan-Quinn criter.	-2.075869
F-statistic	1152.084	Durbin-Watson stat	1.109729
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0.996164. Ini memperlihatkan bahwa dalam variasi variabel bebas sebesar 99 persen. Sedangkan selisihnya 1 persennya dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang dipilih.

4.3.4. Interpretasi Persamaan Regresi Linear Berganda Data Panel

Berdasarkan serangkaian uji di atas, maka hasil estimasi dengan menggunakan FEM diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LOG(PDRB)} = & 11.5391682752 - 0.165948711655 \cdot \text{LOG(DD)} - \\ & 0.163133031603 \cdot \text{LOG(DKB+2)} + 0.1397763226 \cdot \text{LOG(KKD)} + \\ & 0.13203177493 \cdot \text{LOG(EPAD)} + 0.0430974000261 \cdot \text{LOG(BM)} \end{aligned}$$

- Pengaruh Derajat Desentralisasi (DD) terhadap PDRB
Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa DD berpengaruh negatif secara signifikan terhadap PDRB. Kenaikan rasio DD akan menurunkan sebesar 0,16 persen PDRB.
- Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap PDRB
Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa rasio KKD berpengaruh positif secara signifikan terhadap PDRB. Kenaikan rasio KKD akan meningkatkan PDRB sebesar 0,14 persen.
- Pengaruh Derajat Kontribusi BUMD terhadap PDRB
Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa rasio DKB tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
- Pengaruh Efektivitas PAD terhadap PDRB
Hasil persamaan regresi menunjukkan rasio EPAD berpengaruh signifikan secara positif terhadap PDRB. Kenaikan rasio EPAD akan meningkatkan PDRB sebesar 0,13 persen.
- Pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB
Hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa rasio BM tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

4.4. Uji Regresi Dengan Variabel *Moderating* Menggunakan MRA

4.4.1. Identifikasi Jenis Variabel Moderasi

Uji regresi dengan menggunakan MRA untuk melihat pengaruh belanja modal sebagai variabel moderasi dalam memengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengaruh ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel *moderating* juga dapat menyebabkan sifat atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat menjadi positif atau negatif. Berdasarkan pada uji atas variabel bebas X dan Z serta variabel interaksinya ($X*Z$), diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 11. Hasil Uji Regresi MRA

No.	Hubungan X terhadap Y	Variabel Moderasi	Nilai Probabilitas		Jenis Variabel Moderasi	Keterangan
			B2	B3 (Variabel Interaksi)		
1	Hubungan DD terhadap PDRB	Log(BM)	0.0069 Signifikan < 0.05	0.5313 Tidak signifikan > 0.05	<i>Predictor</i> moderasi	Persamaan (2) dan (3)
2	Hubungan KKD terhadap PDRB	Log(BM)	0.0041 Signifikan < 0.05	0.0228 signifikan < 0.05	<i>Quasi</i> moderasi	Persamaan (4) dan (5)
3	Hubungan DKB terhadap PDRB	Log(BM)	0.0010 Signifikan < 0.05	0.8774 Tidak signifikan > 0.05	<i>Predictor</i> moderasi	Persamaan (6) dan (7)
4	Hubungan EPAD terhadap PDRB	Log(BM)	0.0033 Signifikan < 0.05	0.1820 Tidak signifikan > 0.05	<i>Predictor</i> moderasi	Persamaan (8) dan (9)

Sumber: BPS (diolah)

Hasil uji di atas menunjukkan Belanja Modal merupakan *quasi* moderasi yang dapat memoderasi hubungan antara Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap PDRB.

4.4.2. Interpretasi Persamaan atas Variabel Moderasi Terpilih

Untuk mengetahui pengaruh variabel moderasi dalam memoderasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilihat dengan membandingkan koefisiensi determinasi persamaan (4) dan persamaan (5). Adapun hasilnya adalah sebagai berikut.

Tabel 12. Perbandingan Koefisiensi Determinasi R^2

Variabel		Nilai Prob	
		Tanpa Var. Moderasi	Dengan Var. Moderasi
Adjusted R^2		0.995775	0.995910
F-Statistic		1137.720	1141.992
Prob (F-Stat)		0.000000	0.000000

Sumber: BPS (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel belanja modal sebagai variabel moderasi memengaruhi/memperkuat hubungan antara variabel KKD dengan PDRB.

Tabel 13. Uji T-statistic

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.656899	1.352114	0.485831	0.6277
LOG(KKD)	-5.643922	1.653512	-3.413293	0.0008
LOG(BM)	1.580640	0.200584	7.880187	0.0000
M2_KKDBM	0.735131	0.230477	3.189608	0.0017

Sumber: BPS (diolah)

Persamaan hasil regresi:

$$\text{LOG(PDRB)} = 0.656899454677 - 5.64392206871 \cdot \text{LOG(KKD)} + 1.5806404487 \cdot \text{LOG(BM)} + 0.735131000311 \cdot \text{M2_KKDBM}$$

Interpretasi hasil regresi MRA adalah sebagai berikut.

1. Ketergantungan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap PDRB. Membaiknya ketergantungan keuangan daerah akan mengurangi PDRB sebesar 5,64 persen.
2. Belanja modal sebagai variabel bebas secara signifikan memengaruhi PDRB. Kenaikan belanja modal akan meningkatkan PDRB sebesar 1,58 persen.
3. Variabel moderasi belanja modal memengaruhi secara signifikan hubungan antara ketergantungan keuangan daerah dengan PDRB. Semakin tinggi belanja modal maka hubungan antara KKD dengan PDRB semakin tinggi.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

1. Hasil regresi linear berganda data panel menunjukkan bahwa:
 - a. variabel belanja modal dan kontribusi BUMD tidak secara signifikan memengaruhi PDRB;
 - b. variabel derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, dan efektivitas PAD secara signifikan memengaruhi PDRB.
2. Hasil regresi linear berganda MRA menunjukkan bahwa:

- a. ketergantungan keuangan daerah berpengaruh secara negatif terhadap PDRB. Semakin tinggi ketergantungan keuangan daerah akan menurunkan PDRB sebesar 5,64 persen.
- b. Belanja modal sebagai variabel bebas secara signifikan memengaruhi PDRB.
- c. Variabel moderasi belanja modal memengaruhi secara signifikan hubungan antara variabel KKD dengan PDRB. Skor negatif menunjukkan semakin tinggi belanja modal maka hubungan antara KKD dengan PDRB semakin rendah.

5.2. Saran

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan minimum 25 persen dari Dana Transfer Umum untuk infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah. Hal ini perlu diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Namun demikian, *mandatory* ini juga perlu diperluas tidak hanya mencakup proporsinya terhadap Dana Transfer Umum, tapi juga proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah.

Kecenderungan pemerintah daerah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya pada belanja birokrasi dapat ditekan melalui upaya *mandatory* ini, sehingga mempersempit adanya kesenjangan wilayah. Ketergantungan keuangan daerah yang semakin tinggi akan menurunkan PDRB. Untuk mengurangi ketergantungan keuangan daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan PAD yang secara signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB. Kontribusi sektor-sektor dalam PDRB dapat menjadi pertimbangan dalam upaya untuk mengoptimalkan PAD tanpa harus menurunkan produktivitas daerah. Pada akhirnya, peningkatan pelayanan publik yang menjadi tujuan dari dana perimbangan menuntut adanya inovasi-inovasi dari pemerintah daerah untuk tujuan peningkatan kemandirian daerah.

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, antara lain jumlah sampel dan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini. Keterbatasan data menjadi alasan pemilihan sampel pada pemerintah provinsi. Penelitian hanya mengambil rasio keuangan pada pemerintah provinsi yang kondisinya kemungkinan relatif lebih baik dibandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki oleh pemerintahan kabupaten/kota. Karenanya, peneliti menyarankan sampel penelitian dapat diperluas pada tingkat kabupaten/kota untuk melihat hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Arsa, I Ketut. Nyoman Djinar Setiawina. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, hal, 104-112.
- Ayu L, Anisya; Rahayu, Sri; dan Junaidi. (2019). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. Dalam <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/7792> diakses tanggal 20 April 2021.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi, Tahun 2015-2018*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- _____. *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi, Tahun 2017-2020*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Ekananda, Makyus (2016). *Analisis Ekonometrika Data Panel, Edisi 2*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 25. Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kementerian Keuangan RI. *Deskripsi dan Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2016-2018*. Dalam <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=12875> tanggal akses 19 April 2021. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI.
- Kementerian Keuangan RI. *Data APBD dalam* <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412> tanggal akses 19 April 2021. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Keempat. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Sari, Greydi Normala; Kindangen, Paulus; dan Rotinsulu, Tri Oldy. (2016). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014*. Dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/12789/0> diakses tanggal 19 April 2021.
- Suci, Stannia Cahaya dan Alla Asmara. (2014). *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol. 3 No. 1 hlm. 8-22.